

Belanja Modal- Jembatan Penghubung Sinoa-Ulu Ere Bantaeng Segera Digunakan



Kondisi jembatan penghubung antara Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere, di Desa Bonto Macinni, Kecamatan Sinoa, Minggu (19/1/2020).

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2020/01/20/jembatan-penghubung-sinoa-ulu-ere-bantaeng-segera-digunakan>

Penantian warga Desa Bonto Macinni, [Kecamatan Sinoa](#), Kabupaten [Bantaeng](#), akan hadirnya jembatan penghubung ke Kecamatan [Ulu Ere](#), sebentar lagi bakal terwujud.

Jembatan yang sebelumnya mengalami renovasi total, rencannya sudah dapat dilalui kendaraan awal Februari mendatang.

Jembatan yang masuk dalam jalan provinsi ini, telah dikerjakan selama kurang lebih empat bulan lamanya.

Jembatan tersebut direnovasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp3,8 miliar.

Tak hanya menghubungkan antar dua kecamatan, jalur Sinoa-Ulu Ere, juga menjadi jalur alternatif menuju Kabupaten Jeneponto dan Gowa.

Kasi Trantib [Kecamatan Sinoa](#), Irfan Nurmin, yang mengawasi langsung proyek ini, mengatakan, jembatan ini sudah sangat dinanti oleh warga.

Pasalnya, selama masa pengerjaan, warga harus melewati jalan sementara yang berada disamping proyek.

"Di samping jembatan untuk roda dua. Dan itupun kalau tidak hujan. Kalau roda empat memutar ke Morowa, Panaikang, Kecamatan Bissappu, jaraknya sekitar 12 kilometer," kata Irfan, Senin (20/1/2020).

Sekadar diketahui, [Kecamatan Sinoa](#), Kabupaten [Bantaeng](#) memiliki enam desa dan kelurahan, dengan luas total sebesar 43,00 kilometer persegi.

Khusus untuk desa Bonto Macinni, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, luasnya sekitar 6,26 kilometer persegi.

Wilayahnya berada di ketinggian 500-600 meter dari permukaan laut (MDPL).

Kondisi jembatan penghubung antara Kecamatan Sinoa dan Kecamatan Ulu Ere, di Desa Bonto Macinni, Kecamatan Sinoa, Minggu (19/1/2020). (Irfan Nurmin)

Tahun 2017, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 1.895 jiwa, berada di atas Bonto Karaeng dan Bonto Majannang.

Adapun delapan daerah irigasi yaitu Panaikang I, Panaikang II, Panaikang III, Banre, Punlindung, Palimpurang, Bankala Loe dan Sukranga.

Selain delapan daerah irigasi itu, rekonstruksi yang juga diprioritaskan yakni perbaikan pada empat tanggul sungai yaitu Balangsikuyu, Garegea, Cabodo dan Lembang Cina serta tiga jembatan yang dianggap sangat berisiko jika tidak dilakukan pembenahan saat ini.

Menurut Sjafaruddin, penanganan tertentu yang dikhawatirkan berdampak luas ke masyarakat seperti jembatan yang jika dilewati sangat rawan atau ketika ada air maka bisa semakin rentan.

"Kita juga lakukan perbaikan tanggul Cekdam Balang Sikuyu pada sayap bagian barat, meninggikan beberapa titik dan mempertebal dinding samping. Ada juga pembangunan dan rehab rumah warga di dua kecamatan yang rusak berat," jelasnya.

Dinas PUPR Bantaeng mencatat rekonstruksi pada perbaikan secara keseluruhan telah mencapai 35 persen yang pengerjaannya dilakukan dua pekan terakhir. Perbaikan itu ditargetkan selama sebulan dengan nilai anggaran sekitar Rp7 miliar.

"Untuk rehab daerah irigasi dan jembatan sebesar Rp4,73 miliar dan untuk pembangunan rumah warga yang rusak berat sekitar Rp2,34 miliar jadi kurang lebih Rp7 miliar secara keseluruhan," ujarnya.

Tidak kalah penting, yaitu perbaikan kawasan tanggul-tanggul yang dari sisi keselamatan langsung ke kawasan pemukiman sehingga mulai dilakukan perbaikan permanen di beberapa titik, khususnya pada tanggul cabodo Kelurahan Bontosunggu yang kondisinya sangat parah.*

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2020/01/20/jembatan-penghubung-sinoa-ulu-ere-bantaeng-segera-digunakan>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.